



ANALISA

June 10, 2026

Vol. 0003

Hasil Kajian Cepat Terhadap Isu Strategis Kekinian

The Reform Initiatives

Merupakan lembaga riset kebijakan yang bernaung di bawah PT Semesta Infomedia Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

TRI fokus pada penelitian kebijakan terkait Ekonomi, Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Desentralisasi, Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim, Tata Kelola Kebijakan yang Baik, Politik & Elektoral, Penegakan Hukum, Ekonomi Digital, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



Dhimas Alif Utama

Research Associate -
The Reform Initiative (TRI)

Merebut Kembali Ruang Sipil di Era Ekonomi Perhatian

Ruang publik digital Indonesia berkembang sangat cepat dan mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Selain membuka peluang diseminasi informasi yang lebih luas, perubahan ini juga menghadirkan tantangan berupa Hoaks, polarisasi, kekerasan digital, dan melemahnya proses verifikasi. Dalam situasi tersebut, informasi yang dihasilkan organisasi masyarakat sipil sering sulit menembus perhatian publik karena harus bersaing dengan konten viral, hiburan, dan isu-isu yang lebih disukai algoritma platform digital.

Fenomena tersebut berkaitan erat dengan Ekonomi Perhatian (attention economy), yaitu sistem yang menjadikan perhatian manusia sebagai sumber daya ekonomi yang bernilai tinggi. Platform digital berlomba mempertahankan fokus pengguna selama mungkin karena perhatian dapat dikonversi menjadi keuntungan melalui iklan dan data. Akibatnya, konten yang memicu emosi dan keterlibatan sering lebih diutamakan dibandingkan informasi yang akurat, mendalam, dan mendukung terbentuknya masyarakat yang kritis serta terinformasi.

Tantangan Ruang Digital

Mencermati laporan Komdigi yang dipaparkan pada 2 Januari 2024 lalu, Komdigi telah menangani 1.615 konten Hoaks di platform digital, meningkat dibanding 2022 yang mencapai 1.528 kasus. Sejak Agustus 2018, total 12.547 isu hoaks telah ditangani. Kategori terbanyak berkaitan dengan kesehatan, terutama Covid-19, obat-obatan, dan produk kesehatan. Disusul isu pemerintahan, penipuan, serta politik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital masih rentan terhadap penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Karena itu, media massa memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan informasi yang akurat, kredibel, dan berkualitas sebagai rujukan utama bagi masyarakat.

Transformasi praktik jurnalistik turut memengaruhi kualitas informasi publik. Riset menunjukkan sebagian besar jurnalis media daring memanfaatkan media sosial sebagai sumber berita, meskipun tetap menjadikannya sumber sekunder. Di tengah arus informasi yang sangat cepat, proses verifikasi harus tetap menjadi prinsip utama. Tanpa verifikasi yang kuat, media berisiko memperkuat penyebaran informasi yang keliru dan menurunkan kepercayaan publik terhadap produk jurnalistik.

Tantangan tersebut semakin kompleks dalam era Ekonomi Perhatian, ketika perhatian manusia menjadi komoditas bernilai tinggi. Dengan rata-rata waktu daring 7 jam 38 menit per hari, masyarakat Indonesia sangat terpapar pada berbagai konten digital yang saling bersaing merebut perhatian. Akibatnya, konten sensasional sering lebih menonjol daripada informasi yang akurat. Oleh sebab itu, penguatan literasi digital, kualitas jurnalisme, dan kebebasan pers menjadi kunci menjaga kualitas demokrasi di era digital.

Melawan Manipulasi Algoritma

Di era ekonomi perhatian, perhatian publik telah menjadi komoditas yang diperebutkan platform digital. Algoritma media sosial yang dirancang untuk mempertahankan keterlibatan pengguna, dapat berpotensi memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan memahami realitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian bukan lagi sekadar urusan pribadi, melainkan isu publik yang berdampak luas pada kehidupan sosial dan demokrasi.

Karena itu, diperlukan upaya untuk menjembatani produksi pengetahuan masyarakat sipil dengan kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat dan mudah dipahami. Media independen dapat berperan memperluas jangkauan laporan riset, advokasi kebijakan, serta cerita perubahan dari lapangan. Semakin luas informasi berbasis bukti dapat diakses publik, semakin kuat pula fondasi demokrasi yang bertumpu pada partisipasi warga yang sadar dan terinformasi.

Namun, penguatan ruang informasi publik juga memerlukan dukungan kebijakan yang lebih tegas. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan data pribadi dan mengawasi praktik algoritma yang mendorong ketergantungan pengguna. Bersamaan dengan itu, pendekatan Humane Technology harus didorong agar teknologi dikembangkan berdasarkan prinsip etika dan kepentingan publik. Perhatian bukan sekadar sumber daya individu, melainkan fondasi penting bagi kualitas demokrasi dan kebebasan warga negara.

Associate Partner Publication



A summary of this article was published on **beritabaruc** June 10, 2026.

<https://beritabaruc.com/merebut-kembali-ruang-sipil-di-era-ekonomi-perhatian/>